

## **BUSSINESS DEVELOPMENT SERVICES (BDS): MENUJU SUKSES MELALUI LAPORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK UMKM KOTA MAKASSAR**

### ***BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (BDS): TOWARDS SUCCESS THROUGH FINANCIAL REPORTS AND TAXATION FOR UMKM IN MAKASSAR CITY***

Safria Syarifuddin<sup>1\*</sup>, Ilham<sup>1</sup>, Rukminih Arifin<sup>1</sup>, Sri Nirmala Sari<sup>1</sup>, Veronika Sari Denka<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Perpajakan, Politeknik Bosowa

\*Email korespondensi: [safria@politeknikbosowa.ac.id](mailto:safria@politeknikbosowa.ac.id)

#### **Abstract**

*Business Development Services is a program that allows the General Directorate of Taxation to provide guidance and supervision to MSME taxpayers and their businesses to maximize awareness. Business Development Services is a private institution that operates and is involved in small and medium enterprises (SMEs), as the name implies, the BDS provider institution provides services to improve the business performance and competitiveness of MSMEs. This institution is an institutional instrument aimed at encouraging the advancement of MSMEs, not only in the least developed and developing countries, but also in the industrialized countries. DGT involves the Pratama Tax Service Office (KPP) in implementing the BDS program directly in the regions. This allows for more personal assistance according to the needs of local MSMEs. With this program, DGT hopes to create a more inclusive tax ecosystem, where MSMEs can develop more optimally while complying with applicable tax obligations. This program is also a form of DGT's commitment to supporting national economic growth through MSME empowerment.*

**Keywords:** MSMEs, Business Development Services (BDS), Taxpayers

#### **Abstrak**

Business Development Services merupakan Lembaga swasta yang bergerak dan berkecimpung dalam bidang usaha kecil menengah (UKM), sesuai dengan Namanya, Lembaga penyedia BDS memberikan layanan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan daya saing UKM. Lembaga penyedia BDS merupakan instrumen kelembagaan untuk membina dan memajukan UKM, di negara berkembang tetapi juga di negara-negara industri. DJP melibatkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk mengimplementasikan program BDS secara langsung di daerah. Hal ini memungkinkan pendampingan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan UMKM setempat. Dengan program ini, DJP berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif, di mana UMKM dapat berkembang lebih optimal sambil tetap mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Hasil Penelitian BDS memfasilitasi UKM untuk memperoleh modal dan memperluas pangsa pasar yang signifikan dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kota Makassar. Program ini juga merupakan bentuk komitmen DJP untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM..

**Kata kunci:** UMKM, Layanan Pengembangan Usaha (BDS), Wajib Pajak



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2024 Author

Diterima: 2 Desember 2024; Disetujui: 22 Desember-2024; Terbit: 23 Desember 2024

## PENDAHULUAN

BDS yang masih dalam versi pengembangan diuji oleh Direktorat Jendral Pajak di delapan wilayah termasuk Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Sumatera Utara I, Kalimantan Selatan dan Tengah, Sumatera Utara I, Kalimantan Utara Timur, Jawa Tengah I, DIY, Banten, Jakarta Timur dan Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Surat Edaran DJP nomor S284/PJ.13/2016 menjelaskan bahwa BDS ini berupa kegiatan pelatihan pembinaan bagi UKM dalam pemberian sarana materi untuk mengembangkan usaha UKM, yang juga materi yang berkaitan dengan perpajakan. Pada dua program BDS ini mendapatkan sambutan antusias dari para pemangku kepentingan UMKM (Kemenkeu, 2019)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak mengatur empat kriteria wajib pajak kriteria tertentu yang disebut wajib pajak patuh sebagai berikut: 1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT; 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. (Kemenkeu P. K., 2018)

Usaha mikro, kecil dan menengah memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah unit usaha yang fantastis, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 61% atau senilai dengan Rp 9,580 triliun. Besarnya peranan UMKM membuat pemerintah berupaya memberikan perhatian lebih terhadap UMKM. (Kemenkeu D. J., 2023)

Program BDS merupakan bagian dari program edukasi perpajakan DJP sejak 2018. SE-13/PJ/2018 tentang petunjuk pelaksanaan program business development services. Melalui program BDS, DJP berupaya membina dan mendampingi UMKM dengan memberikan beragam materi atau tema pembelajaran. Selain materi seputaran

pajak, BDS juga menawarkan berbagai materi lain sesuai dengan kebutuhan UMKM. keterampilan bisnis dan manajemen bagi pelaku UKM dan usaha mikro. (Asamarani, 2024) Kegiatan BDS melibatkan beberapa UMKM di Kota Makassar. Objek pengabdian yaitu Politeknik Bosowa Makassar Jl. Kapasa Raya No.23 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kode Pos 90241.

## METODE

- **Tahap Persiapan** bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendapatkan peserta yang tepat. Kegiatan yang dilakukan:
  - a. **Survei Lokasi:** Mengidentifikasi lokasi target program untuk memastikan kesesuaian kebutuhan masyarakat dengan layanan yang ditawarkan.
  - b. **Identifikasi Kebutuhan Masyarakat:** Menggali masalah kendala yang sering di temukan pelaku UKM melalui wawancara, diskusi kelompok, atau angket.
  - c. **Penentuan Peserta:** Memilih peserta berdasarkan kriteria seperti sektor usaha, potensi untuk berkembang, dan keterlibatan aktif dalam program.
- **Tahap Pelaksanaan:** Tahap ini bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendapatkan peserta yang tepat
  - a. Sesi pelatihan, diskusi, dan praktik; Peserta dilibatkan dalam pelatihan interaktif untuk memahami materi, berdiskusi dengan fasilitator, dan melakukan praktik langsung terkait manajemen usaha, pemasaran, inovasi produk, dan keuangan.
  - b. Dilakukan melalui kunjungan langsung (on-site) dan konsultasi online, pendampingan ini bertujuan membantu peserta mengimplementasikan materi pelatihan dalam usaha mereka.
  - c. Pendampingan mencakup pembenahan operasional, pengembangan produk, serta pemasaran dan promosi. Evaluasi kemajuan setiap peserta.
- **Tahap Monitoring dan Evaluasi:**
  - a. Dilakukan melalui kunjungan langsung (on-site) dan konsultasi online,

pendampingan ini bertujuan membantu peserta mengimplementasikan materi pelatihan dalam usaha mereka.

- b. Pendampingan mencakup pembenahan operasional, pengembangan produk, serta pemasaran dan promosi.
- c. Menilai hasil kegiatan melalui indikator seperti peningkatan omset usaha peserta.
- d. Menyusun laporan akhir kegiatan sebagai bahan rekomendasi untuk program berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan Kamis, pukul 09.00-15.00 Wita. 18 Juli 2024. Lokasi kegiatan Kampus Politeknik Bosowa (Jl. Kapasa Raya nomor 23, Kota Makassar). Business Development Services adalah program yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program ini dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM sekaligus mendorong pengembangan usaha mereka. BDS Mempermudah UMKM memahami dan mematuhi kewajiban pajak sehingga mengurangi risiko sanksi atau denda. Serta, membantu UMKM mengelola keuangan dan bisnis dengan lebih baik, sehingga memperbesar peluang untuk berkembang. Akses ke Informasi dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk terhubung dengan berbagai sumber daya dan peluang usaha. Program ini merupakan langkah strategis dari DJP untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.



Gambar 1. Banner Kegiatan BDS



Gambar 2. Foto Bersama Direktur Poltekbos



**Gambar 2.** Foto Bersama Peserta kegiatan BDS



**Gambar 4.** Foto Bersama Panitia BDS

## KESIMPULAN

*Business Development Services* adalah program yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang melimpahkan Rahmat serta

Petunjuknya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dapat terlaksana.

1. Direktur Poltekbos memberikan bantuan dan arahan kepada Dosen dan mahasiswa.
2. Wakil Direktur 1 Politeknik Bosowa atas arahan dan petunjuknya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Wakil Direktur 2 Politeknik Bosowa atas bantuan pendanaan institusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.
4. Ketua Program Studi Perpajakan atas terselenggaranya kegiatan ini.
5. Tax Center Politeknik Bosowa atas inisiasi kegiatan ini.
6. Mahasiswa(i) Politeknik Bosowa yang tergabung di dalam Tim Relawan Pajak Politeknik Bosowa atas kontribusinya dalam kegiatan ini.
7. UMKM Kota Makassar.

Besar harapan kami kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat kepada para wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban tahunannya yaitu membuat laporan keuangan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Semoga kegiatan ini dapat diselenggarakan secara rutin dan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sehingga memenuhi target penerimaan negara atas pajak.

## Daftar Pustaka

Asamarani, N. G. (2024, Oktober 8). *Apa itu Program Bussines Development Service (BDS) dari DJP?* Retrieved from Apa itu Program Bussines Development Service (BDS) dari DJP?: <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1805905/apa-itu-program-business-development-services-bds-dari-djp>

Kemenkeu, B. D. (2019, January 24). *Penyuluhan Pajak Dengan Bussines Development Service (BDS)*. Retrieved from Balai Diklat Keuangan Denpasar: <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-denpasar/berita/penyuluhan-pajak-dengan-bussines-development-service-bds-054865>

Kemenkeu, D. J. (2023, July 15). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. Retrieved from UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat:  
<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>

Kemenkeu, P. K. (2018). Tata Cara Pengembalian Kelebihan dan Pembayaran Pajak. In Kemenkeu, *Tata Cara Pengembalian Kelebihan dan Pembayaran Pajak* (p. 3). Indonesia: jdih.kemenkeu.go.id.

Kemenkeu, B. D. (2019, January 24). *Penyuluhan Pajak Dengan Bussines*

---

*Development Service (BDS)*. Retrieved from Balai Diklat Keuangan Denpasar: <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-denpasar/berita/penyuluhan-pajak-dengan-bussines-development-service-bds-054865>

Kemenkeu, P. K. (2018). Tata Cara Pengembalian Kelebihan dan Pembayaran Pajak. In Kemenkeu, *Tata Cara Pengembalian Kelebihan dan Pembayaran Pajak* (p. 3). Indonesia: jdih.kemenkeu.go.id.